

BPK : Kerugian Daerah Ketapang Rp 19,4 Miliar

Jaidi Chandra

Borneo Tribune, Ketapang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pontianak menemukan 174 laporan keuangan bermasalah Pemkab Ketapang per 31 Oktober 2010, sejak tahun anggaran 2003-2009. Akibatnya negara dirugikan Rp 19,4 miliar. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja, Senin (24/1).

Ia mengatakan temuan tersebut merupakan rekomendasi dari BPK sebanyak 359. Kemudian yang sudah

ditindak lanjuti sesuai saran sebanyak 34,5 persen atau 124 rekomendasi.

Kemudian yang sudah ditindaklanjuti tidak sesuai saran adalah 117 atau 32,59 persen. Dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 123 atau 34,26 persen. Dari temuan itu begara dirugikan Rp19,4 miliar pada 2009, kata Kamboja.

"Agar temuan BPK tidak bermasalah, saya sarankan Pemkab Ketapang bersama DPRD dan instansi terkait segera menindaklanjuti te-

muan tersebut," kata Kamboja. Bupati Ketapang, Hendrikus menanggapi hal itu. Ia mengatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan itu dengan membentuk tim untuk menangani temuan tersebut.

"Kami akan segera membahas, karena saat itu sebagai pengguna anggaran sudah berganti kepengurusan," kata Hendrikus. Misalkan bantuan untuk partai politik, organisasi kemasyarakatan sudah berganti kepengurusan. □



Gusti Kamboja
FOTO: Jaidi C/Borneo Tribune